

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Anggaran Belanja Program Pembangunan Kota Padang

4.1.1 Data Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Berikut adalah alokasi anggaran belanja dan realisasi anggaran di kota padang tahun 2023. Total Anggaran Kota Padang yang ditetapkan pada rapat paripurna, 28 November 2022 senilai Rp 2.540.106.311.240. Anggaran kota padang ini dialokasikan untuk mendanai aktivitas perbelanjaan kota padang di tahun 2023. Distribusikan alokasi anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4. 1 Data Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.048.841.616.570	971.124.928.490	77.716.688.080
	Belanja Barang dan Jasa	725.795.977.910	695.309.669.940	30.486.307.970
	Belanja Bunga	1.648.725.550	1.522.987.360	125.738.190
	Belanja Subsidi	19.678.032.800	17.769.976.420	1.908.056.380
	Belanja Hibah	146.868.022.600	135.566.193.400	11.301.829.200
	Belanja Bantuan Sosial	13.459.211.000	9.707.189.200	3.752.021.800
	Jumlah Belanja Daerah	1.956.291.586.430	1.831.000.944.810	125.290.641.620
	Belanja Tanah	5.113.620.070	5.058.493.600	55.126.470

2	Belanja Peralatan dan Mesin	78.910.180.760	71.448.379.290	7.461.801.470
	Belanja Gedung dan Bangunan	259.543.607.020	217.383.087.440	42.160.519.580
	Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi	118.334.475.050	90.711.257.080	27.623.217.970
	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.823.787.210	7.753.403.640	3.070.383.570
	Belanja Aset Lainnya	958.730.000	629.129.020	329.600.980
3	Belanja Tak Terduga	2.071.887.170	974.600.000	1.097.287.170
Jumlah Belanja		2.432.047.873.710	2.224.959.294.880	207.088.578.830
4	SiLPA Tahun Sebelumnya	25.646.639.020	25.646.639.020	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	57.662.353.470	43.085.918.130	14.576.435.340
	Jumlah Penerimaan	83.308.992.490	68.732.557.150	14.576.435.340
5	Penyertaan Modal Daerah	24.749.445.040	3.600.000.000	21.149.445.040
TOTAL 2023		2.540.106.311.240	2.297.291.852.030	242.814.459.210

(Sumber: Data Internal Bappeda Kota Padang)

Selain belanja pegawai, alokasi anggaran yang cukup besar juga terdapat pada belanja barang dan jasa sebesar Rp725.795.977.910. Besarnya

porsi ini menunjukkan bahwa kebutuhan operasional pemerintahan, seperti pengadaan barang, jasa, dan kegiatan pendukung lainnya, menjadi komponen utama dalam pelaksanaan program daerah. Sementara itu, belanja hibah sebesar Rp146.868.022.600 mencerminkan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga atau kelompok masyarakat tertentu. Adapun belanja bantuan sosial sebesar Rp13.459.211.000 menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun proporsinya relatif lebih kecil dibandingkan belanja operasional lainnya. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa struktur anggaran pemerintah daerah umumnya masih didominasi oleh belanja operasional guna mendukung aktivitas rutin pemerintahan.

Pada kelompok belanja modal, alokasi anggaran sebesar Rp473.684.400.110 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pengadaan aset tetap. Komponen terbesar pada kelompok ini terdapat pada belanja gedung dan bangunan serta belanja jalanjaringan, dan irigasi, yang mencerminkan fokus pada pembangunan infrastruktur publik. Hal ini penting karena belanja modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, jika dibandingkan dengan belanja operasional, proporsi belanja modal masih relatif lebih kecil, yang mengindikasikan bahwa orientasi anggaran belum sepenuhnya berfokus pada pembangunan jangka panjang (Abdul Halim, 2014).

Selain itu, terdapat belanja tak terduga sebesar Rp2.071.887.170 yang dialokasikan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keberadaan anggaran ini penting sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat atau kejadian luar biasa.

4.1.2 Data Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Berikut adalah alokasi anggaran belanja dan realisasi anggaran di kota padang tahun 2024. Total Anggaran Kota Padang yang ditetapkan pada rapat paripurna, 30 November 2023 senilai Rp 2.598.154.808.130. Berikut distribusi anggaran untuk tahun 2024.

Tabel 4. 2 Data Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

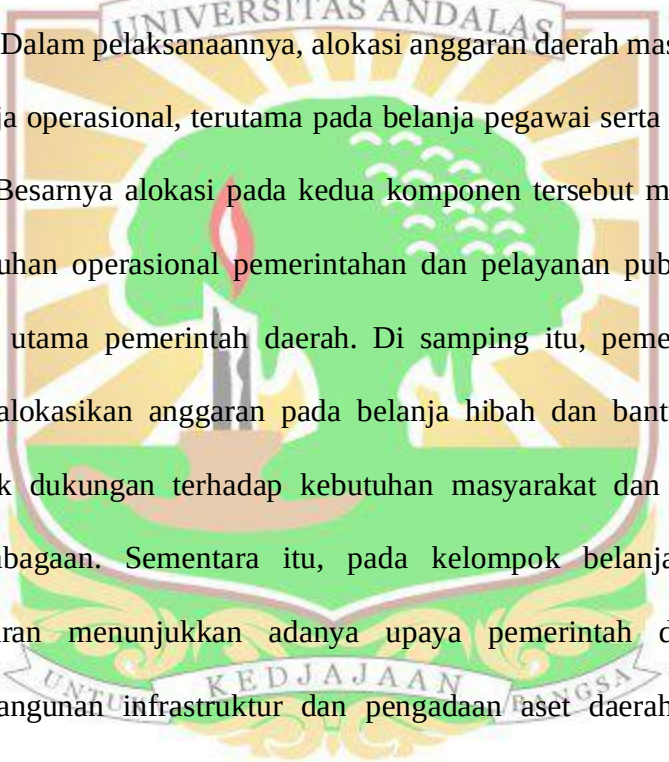
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.045.359.849.326	966.108.721.300	79.251.128.026
	Belanja Barang dan	762.027.674.416	724.492.347.958	37.535.326.458
	Jasa			
	Belanja Bunga	2.616.295.538	2.496.004.487	120.291.051
	Belanja Subsidi	30.544.086.437	29.446.327.138	1.097.759.299
	Belanja Hibah	197.791.983.200	185.058.844.688	12.733.138.512
	Belanja Bantuan Sosial	21.786.282.758	16.491.678.000	5.294.604.758
	Jumlah Belanja Daerah	2.060.126.171.675	1.924.093.923.572	136.032.248.103
	Belanja Peralatan dan Mesin	62.837.800.611	54.517.581.855	8.320.218.756

	Belanja Gedung dan Bangunan	266.818.055.811	254.375.266.684	12.442.789.127
	Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi	92.862.497.906	77.850.106.979	15.012.390.927
	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.721.886.806	12.479.569.567	(1.757.682.761)
	Belanja Aset Lainnya	638.000.000	469.092.350	168.907.650
	Jumlah Belanja Modal	433.878.241.134	399.691.617.435	33.386.623.699
3	Belanja Tak Terduga	5.899.762.870	888.426.299	5.011.336.571
	Jumlah Belanja	2.500.053.575.679	2.324.673.967.306	175.379.608.373
4	SiLPA Tahun Sebelumnya	89.801.232.451	89.801.232.451	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
	Jumlah Penerimaan	89.801.232.451	89.801.232.451	0
5	Penyertaan Modal Daerah	8.300.000.000	8.300.000.000	0
	TOTAL 2024	2.598.154.808.130	2.422.775.199.757	175.379.608.373

(Sumber: Data Internal Bappeda Kota Padang)

Berdasarkan data anggaran Tahun 2024, Pemerintah Kota Padang menetapkan total anggaran sebesar Rp2.598.154.808.130 dengan realisasi mencapai Rp2.422.775.199.757. Dari jumlah tersebut terdapat selisih sebesar Rp175.379.608.373 yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran masih

berada di bawah pagu yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran daerah selama tahun 2024 berlangsung cukup terkendali karena penggunaan dana tidak melebihi batas yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, menurunnya nilai selisih dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan dalam proses pengelolaan dan pengendalian anggaran daerah sehingga realisasi anggaran menjadi lebih mendekati target yang telah disusun.



Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran daerah masih didominasi oleh belanja operasional, terutama pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Besarnya alokasi pada kedua komponen tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik masih menjadi fokus utama pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran pada belanja hibah dan bantuan sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan masyarakat dan berbagai kegiatan kelembagaan. Sementara itu, pada kelompok belanja modal, realisasi anggaran menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah, khususnya pada pembangunan gedung, fasilitas umum, serta sarana penunjang aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional, tetapi juga tetap mendorong pelaksanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran Tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan

relatif baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat penyerapan anggaran serta semakin kecilnya perbedaan antara anggaran dan realisasi dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, rendahnya penggunaan belanja tak terduga mengindikasikan bahwa selama tahun 2024 kondisi daerah cenderung stabil dan tidak banyak terjadi keadaan darurat yang memerlukan penggunaan dana di luar perencanaan utama. Dengan demikian, pengelolaan anggaran daerah pada tahun 2024 dapat dikatakan mengalami perbaikan, baik dari sisi ketepatan pelaksanaan program maupun efektivitas pengendalian penggunaan anggaran daerah.

4.2 Data Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan

4.2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 4. 3 Data Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023-2024

Tahun	IPM
2023	83,98
2024	84,38

(Sumber: Kota Padang dalam angka, BPS Kota Padang)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 83,98 pada tahun 2023 menjadi 84,38 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 0,40 poin ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, walaupun peningkatannya belum terlalu besar. Secara umum, IPM menggambarkan kondisi pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, kenaikan ini bisa diartikan sebagai adanya kemajuan pada salah satu atau beberapa aspek tersebut (Badan Pusat Statistik, 2023). Sejalan dengan itu, Mahbub ul Haq menyatakan bahwa pembangunan seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan hanya

pertumbuhan ekonomi.

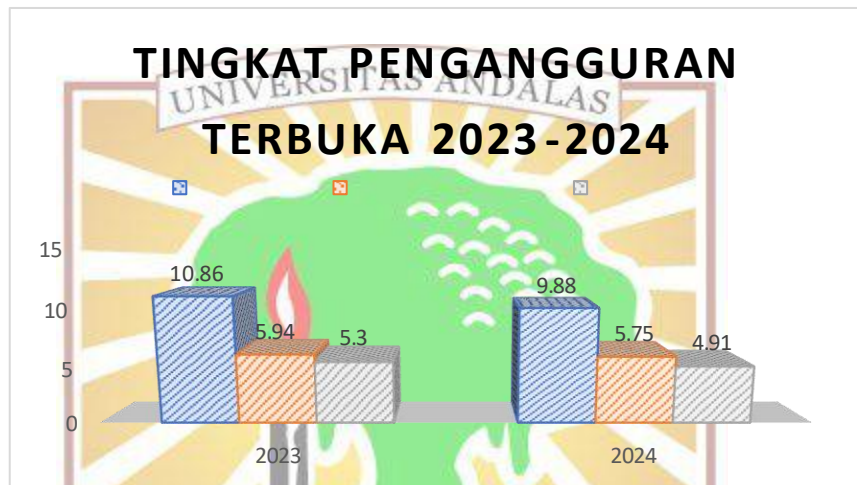
Meskipun trennya positif, kenaikan IPM yang relatif kecil menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat masih berlangsung secara bertahap. Hal ini wajar, karena perubahan pada sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi biasanya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Amartya Sen, pembangunan manusia berkaitan dengan perluasan kesempatan dan kemampuan individu, sehingga hasilnya tidak bisa langsung terlihat dalam waktu cepat. Faktor lain seperti pemerataan akses layanan dan kondisi ekonomi juga ikut memengaruhi lambat atau cepatnya peningkatan IPM. Secara keseluruhan, kenaikan IPM dari tahun 2023 ke 2024 tetap menunjukkan arah yang baik. Artinya, upaya pembangunan manusia masih berjalan dan memberikan hasil, meskipun belum terlalu signifikan.

4.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk melihat perkembangan kondisi ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran, perlu dilakukan analisis terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2023–2024 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan tingkat nasional. TPT merupakan indikator yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan, sehingga dapat digunakan untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik). Selain itu, tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan (Sadono Sukirno), serta faktor struktural dan

siklus ekonomi seperti perubahan permintaan tenaga kerja dan ketidaksesuaian keterampilan (N. Gregory Mankiw). Oleh karena itu, data TPT berikut ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika pengangguran serta perkembangan penyerapan tenaga kerja pada periode tersebut.

Gambar 4. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023-2024



(Sumber: Kota Padang dalam angka, BPS Kota Padang)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan pada periode 2023–2024 di semua wilayah. Di Kota Padang, TPT turun dari 10,86% pada tahun 2023 menjadi 9,88% pada tahun 2024. Penurunan serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari 5,94% menjadi 5,75%, serta pada tingkat nasional dari 5,30% menjadi 4,91%. Secara umum, penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi pasar tenaga kerja, di mana semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap. Menurut Badan Pusat Statistik, TPT merupakan indikator yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga penurunannya dapat diartikan sebagai membaiknya kesempatan kerja.

Meskipun demikian, tingkat pengangguran di Kota Padang masih lebih

tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan di pasar kerja perkotaan relatif lebih besar, yang umumnya disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi dan meningkatnya jumlah pencari kerja. Sadono Sukirno menjelaskan bahwa pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, N. Gregory Mankiw juga menyatakan bahwa pengangguran dapat dipengaruhi oleh faktor struktural dan siklus ekonomi, termasuk perubahan permintaan tenaga kerja dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

Secara keseluruhan, penurunan TPT pada tahun 2024 menunjukkan arah yang positif dalam mengurangi tingkat pengangguran. Namun, tingginya angka pengangguran di Kota Padang dibandingkan wilayah lain menjadi perhatian penting. Dalam hal ini, Amartya Sen menekankan bahwa kesempatan kerja merupakan bagian dari perluasan kapabilitas manusia, sehingga penurunan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4. 4 Data Perkembangan Ekonomi Tahun 2023-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2023	4,54%
2024	4,65%

(Sumber: Kota Padang dalam angka, BPS Kota Padang)

Berdasarkan data pada tabel, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

mengalami kenaikan dari 4,54% pada tahun 2023 menjadi 4,65% di tahun 2024. Selisih peningkatan sebesar 0,11% tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas perekonomian daerah mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat digunakan sebagai gambaran mengenai kondisi perkembangan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu.

Kenaikan angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat masih berjalan dengan cukup stabil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun kegiatan produksi yang dilakukan oleh berbagai sektor usaha. Dengan adanya peningkatan aktivitas tersebut, maka nilai output atau pendapatan daerah juga cenderung mengalami peningkatan.

Di samping itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan anggaran daerah. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif. Kondisi tersebut secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Walaupun peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2024 relatif tidak terlalu besar, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa perekonomian daerah berada dalam keadaan yang cukup stabil. Stabilitas ekonomi menjadi hal penting karena dapat mendukung keberlangsungan

pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Stabilitas ekonomi menjadi hal penting karena dapat mendukung keberlangsungan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih optimal agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (Sukirno, 2019).

4.3 Perhitungan Varians Anggaran

Tabel 4. 5 Perhitungan Varians

Uraian	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians (Rp)	Varians (%)	F/U
Jumlah Belanja Daerah	2023	1.956.291.586.430	1.831.000.944.810	125.290.641.620	6,4%	F
	2024	2.060.126.171.675	1.924.093.923.572	136.032.248.103	6,6%	F
Jumlah Belanja Modal	2023	473.684.400.110	392.983.750.070	80.700.650.040	17%	F
	2024	433.878.241.134	399.691.617.435	33.386.623.699	7,8%	F
Belanja Tak Terduga	2023	2.071.887.170	974.600.000	1.097.287.170	52,9%	F
	2024	5.899.762.870	888.426.299	5.011.336.571	84,9%	F
Jumlah Penerimaan	2023	83.308.992.490	68.732.557.150	14.576.435.340	17,4%	U
	2024	89.801.232.451	89.801.232.451	0	0%	F
TOTAL	2023	2.540.106.311.240	2.297.291.852.030	242.814.459.210	9,5%	F
	2024	2.598.154.808.130	2.422.775.199.757	175.379.608.373	6,7%	F

(Sumber: Data Diolah oleh Penulis)

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasinya pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, jumlah

anggaran tercatat sebesar Rp2.540.106.311.240, sedangkan realisasi mencapai Rp2.297.291.852.030, sehingga terdapat selisih (varians) sebesar Rp242.814.459.210 atau 9,56% dengan tingkat penyerapan 90,44%. Pada tahun 2024, anggaran meningkat menjadi Rp2.598.154.808.130 dengan realisasi Rp2.422.775.199.757, sehingga varians menurun menjadi Rp175.379.608.373 atau 6,75% dengan tingkat penyerapan sebesar 93,25%. Selisih yang terjadi pada kedua tahun tersebut tergolong *Favorable* (F) karena realisasi berada di bawah anggaran. Fenomena ini lazim dalam pengelolaan keuangan sektor publik, mengingat anggaran berfungsi sebagai batas maksimal pengeluaran yang tidak boleh dilampaui (Mardiasmo, 2018). Penurunan tingkat varians pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam ketepatan perencanaan serta pelaksanaan anggaran.

Jika dilihat lebih rinci, pada komponen Jumlah Belanja Daerah terdapat pola yang relatif sama, dengan varians sebesar 6,40% pada tahun 2023 dan 6,60% pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa penyerapan anggaran cenderung stabil, meskipun belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Pada Belanja Modal, terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana varians menurun dari 17,04% pada tahun 2023 menjadi 7,88% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran semakin mendekati rencana, yang dapat diartikan sebagai peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Sebaliknya, pada Belanja Tak Terduga, selisih yang muncul sangat besar, yaitu 52,96% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 84,94% pada tahun 2024. Tingginya varians ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran tidak digunakan. Meskipun hal tersebut masih dapat diterima karena sifatnya yang antisipatif, besarnya selisih juga

dapat menunjukkan adanya kecenderungan penganggaran yang terlalu tinggi (*overestimasi*), sehingga kurang mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan dana (Halim, 2014). Selain itu, permasalahan dalam penyerapan anggaran juga sering berkaitan dengan hambatan administratif maupun teknis dalam pelaksanaan kegiatan (Nordiawan et al., 2012).

Pada sisi Jumlah Penerimaan, tahun 2023 menunjukkan selisih sebesar 17,49% yang bersifat *Unfavorable* (U) karena realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2024 kondisi tersebut membaik dengan tidak adanya selisih (0,00%), yang berarti target penerimaan berhasil dicapai sepenuhnya. Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat dari menurunnya varians serta meningkatnya tingkat penyerapan anggaran. Jika dikaitkan dengan konsep value for money, kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek efisiensi dan efektivitas, meskipun dari sisi ekonomi masih perlu diperhatikan, khususnya pada belanja tak terduga yang menunjukkan selisih sangat besar.

4.4 Analisis Keterkaitan Varians dengan Indikator Pembangunan

Hubungan antara varians anggaran dengan indikator pembangunan Kota

Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Varians dan Indikator Pembangunan

Tahun	Varians (%)	IPM	TPT	Pertumbuhan Ekonomi
2023	9,5%	83,98	10,86	4,54%
2024	6,7%	84,38	9,88	4,65%

(Sumber: Data olahan penulis dan BPS Kota Padang)

Berdasarkan data pada tabel di atas, pengelolaan anggaran daerah Kota Padang pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya tingkat penyerapan anggaran dari 90,5% pada tahun 2023 menjadi 93,3% pada tahun 2024. Di sisi lain, persentase varians anggaran mengalami penurunan dari 9,5% menjadi 6,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran semakin mendekati jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan lebih maksimal. Menurunnya varians juga menggambarkan bahwa selisih antara anggaran dan realisasi semakin kecil, yang berarti proses pelaksanaan kegiatan serta penggunaan dana daerah menjadi lebih terarah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2018), tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah berjalan secara efektif dan mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.

Apabila dikaitkan dengan efisiensi kinerja keuangan, peningkatan penyerapan anggaran dan penurunan varians tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah. Realisasi anggaran yang semakin mendekati target mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Semakin kecil tingkat varians yang terjadi, maka semakin kecil pula penyimpangan antara anggaran dan realisasi sehingga penggunaan anggaran dapat dikatakan lebih efisien. Dalam konsep akuntansi sektor publik, efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk

mencapai tujuan dan target program secara optimal (Mahmudi, 2019). Walaupun demikian, tingginya tingkat penyerapan anggaran belum sepenuhnya dapat dijadikan indikator bahwa kinerja keuangan telah efisien secara keseluruhan. Hal tersebut karena efisiensi tidak hanya dilihat dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari keberhasilan program dalam menghasilkan manfaat nyata dan output yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Selain menunjukkan peningkatan dari sisi pengelolaan keuangan, kondisi tersebut juga diikuti dengan perkembangan indikator kinerja pembangunan daerah yang cenderung mengalami perbaikan. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 83,98 menjadi 84,38, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 10,86% menjadi 9,88%, sedangkan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,54% menjadi 4,65%. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara pengelolaan anggaran daerah dengan perkembangan pembangunan di Kota Padang. Penurunan varians anggaran menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, serta kegiatan ekonomi daerah, dapat direalisasikan dengan lebih baik sesuai target yang telah direncanakan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran sektor publik memiliki fungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, perkembangan indikator pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh

faktor lain seperti kondisi perekonomian nasional, investasi, inflasi, serta tingkat daya beli masyarakat.

4.5 Analisis Faktor Pengaruh Pembangunan Kota Padang

4.5.1 Kendala dalam Pencapaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang P2EPD BAPPEDA Kota Padang serta didukung data realisasi anggaran periode 2023–2024, ditemukan sejumlah kendala yang memengaruhi tingkat penyerapan anggaran daerah, antara lain:

1) Ketidaksesuaian estimasi anggaran dengan harga pasar

Nilai yang tercantum dalam pagu anggaran merupakan perkiraan awal yang belum tentu mencerminkan harga riil di lapangan. Pada proses pengadaan, khususnya belanja modal seperti pembangunan gedung dan infrastruktur, harga penawaran dari penyedia akan dinegosiasikan kembali sesuai kondisi pasar. Hal ini menjadi salah satu penyebab struktural tingginya varians pada komponen belanja modal, yang tercatat sebesar 17,04% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 7,88% pada tahun 2024. Meskipun varians ini bersifat favorable, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis data harga yang akurat dan mutakhir.

2) Kompleksitas prosedur administratif pencairan anggaran

Setiap transaksi pengeluaran wajib dilengkapi dasar hukum yang sah dan dokumen pendukung yang lengkap, mulai dari ketentuan pembayaran honorarium hingga referensi standar satuan harga yang digunakan. Apabila

OPD tidak memiliki kesiapan administratif yang memadai, proses pencairan akan terhambat dan berdampak pada tertundanya realisasi anggaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Nordiawan et al. (2016) yang menyatakan bahwa hambatan administratif dan teknis merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi rendahnya penyerapan anggaran di sektor publik.

- 3) Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan anggaran

Kemampuan tim pelaksana di masing-masing OPD sangat menentukan kelancaran realisasi program, terutama pada kegiatan yang memerlukan keahlian teknis tertentu. Ketika kapasitas tersebut belum memadai, pelaksanaan kegiatan menjadi lambat dan tidak optimal sehingga berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Kondisi ini turut menjelaskan masih tingginya variansi pada komponen belanja tak terduga yang mencapai 84,94% pada tahun 2024.

- 4) Kekakuan siklus anggaran tahunan

Seluruh kegiatan pemerintahan terikat pada tahun anggaran yang berjalan dan tidak dapat diperpanjang. Ketika terjadi keterlambatan pada awal tahun, baik dalam proses perencanaan maupun pengadaan, beban pelaksanaan akan menumpuk di akhir tahun anggaran. Situasi demikian tidak jarang mengakibatkan penurunan kualitas output kegiatan akibat tekanan waktu yang semakin sempit.

4.5.2 Faktor Pendukung dan Inovasi Perencanaan

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, indikator pembangunan Kota Padang secara konsisten menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang periode 2023–2024. Capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung berikut:

1) Kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara

Narasumber dalam wawancara menegaskan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan tidak semata ditentukan oleh besaran anggaran yang dialokasikan, melainkan sangat bergantung pada kemampuan ASN dalam mengelola sumber daya tersebut secara tepat dan berorientasi pada dampak yang dihasilkan. ASN yang kompeten mampu merancang program yang tepat sasaran, melaksanakannya dengan efisien, serta mempertanggungjawabkannya secara transparan dan akuntabel. Pandangan ini selaras dengan pernyataan Mahmudi (2019) bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor determinan dalam keberhasilan pengelolaan keuangan di sektor publik.

2) Pengawasan konsisten terhadap dokumen perencanaan Pembangunan BAPPEDA menjalankan peran strategis dalam memastikan seluruh program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, maupun program unggulan Walikota dapat terlaksana sesuai target yang direncanakan. Fungsi pengawasan ini berperan sebagai mekanisme pengendalian pada tataran makro yang menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

3) Kejelasan pembagian peran dan fungsi antar Lembaga

Terdapat pemisahan fungsi yang tegas antara BAPPEDA sebagai lembaga perencana dan pengawal target pembangunan dengan Inspektorat Daerah yang bertugas mengawasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di tingkat OPD. Kejelasan peran ini menciptakan sistem tata kelola yang lebih terstruktur dan memungkinkan setiap lembaga bekerja secara lebih fokus sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

4) Peningkatan kapasitas ASN yang dilakukan secara berkesinambungan

Pembinaan, pelatihan, serta pengembangan pola pikir aparatur yang diarahkan pada orientasi pencapaian target merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memberikan dampak nyata terhadap kinerja pembangunan. Hasilnya tercermin dari membaiknya sejumlah indikator pembangunan daerah meskipun varians anggaran masih tercatat dalam kisaran yang cukup besar.

5) Stabilitas kondisi perekonomian daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang terjaga pada kisaran 4,54% hingga 4,65% selama periode 2023–2024 menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan. Stabilitas ini turut memperkuat daya beli masyarakat dan menggerakkan aktivitas sektor produktif, sehingga program pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.